



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2019-2020**

KAMIS, 16 JULI 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2019 - 2020**

KAMIS, 16 JULI 2020

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Yang Kami hormati:

- Para Wakil Ketua DPR;
- Para Anggota DPR;
- Hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.

Masa Persidangan ini telah berlangsung sejak tanggal 15 Juni 2020 dan akan berakhir pada hari ini. Selanjutnya DPR akan memasuki Tahun Sidang 2020-2021, dimulai pada tanggal 14 Agustus 2020 yang akan datang.

Sidang Dewan yang terhormat, Hadirin yang saya hormati,

Dalam Masa Persidangan IV ini, kita bekerja dalam tatanan kehidupan normal baru (*new normal*) menghadapi pandemi Covid-19.

Kita telah bekerja bersama dengan Pemerintah, secara bergotong-royong dalam upaya menanggulangi Covid-19 beserta dampaknya.

Penanganan pandemi covid-19 beserta dampaknya, masih membutuhkan upaya dan kerja keras agar pemulihan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi dapat berjalan efektif.

Pemulihan aktivitas masyarakat di masa pandemi covid-19 saat ini, masih membutuhkan sosialisasi, edukasi, dan kedisiplinan bersama dalam menjalankan protokol kesehatan melawan covid-19.

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita semua; di lembaga legislatif, eksekutif, swasta, dan masyarakat; untuk memiliki komitmen dalam menjalankan protokol kesehatan melawan covid-19. Melawan pandemi covid-19, membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dari kita semua.

Dalam masa Persidangan IV ini, pelaksanaan fungsi legislasi, DPR bersama Pemerintah telah melakukan penyelesaian pembahasan terhadap sejumlah RUU, yaitu:

1. UU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. UU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*); dan
3. UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*).

Di samping itu, DPR bersama Pemerintah dan DPD telah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan mengurangi 16 (*enam belas*) RUU dari daftar Prolegnas Prioritas.

Selain itu terdapat 3 (*tiga*) RUU yang ditambahkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, serta 2 (*dua*) RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prioritas Tahun 2020. Dengan demikian jumlah RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sebanyak 37 RUU.

Evaluasi tersebut tidak dapat dihindari karena proses pembahasan RUU sedikit banyak terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 saat ini.

DPR tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan RUU menjadi UU sebagai tugas konstitusional dalam fungsi legislasi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam fungsi anggaran, seluruh komisi telah menyelesaikan pembahasan pendahuluan penyusunan RAPBN 2021.

APBN merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam mensejahterakan rakyat.

Melalui pembahasan di AKD DPR, Pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi makro RAPBN 2021, yaitu:

- pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen;
- inflasi 2,0 s.d. 4,0 persen;
- nilai tukar rupiah Rp13.700-14.900 per dollar AS;
- suku bunga SBN 10 tahun, 6,29%-8,29%;
- ICP USD42-45 per barel;
- *lifting* minyak bumi 690-710 ribu barel per hari; serta
- *lifting* gas bumi 990-1.010 ribu per hari.

Dengan target dan indikator pembangunan pada 2021 yang disetujui bersama adalah:

- bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 7,7 s.d. 9,1 persen;
- tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 s.d. 9,7 persen;
- target gini rasio 0,377-0,379;
- target indeks pembangunan manusia (IPM) 72,78-72,95; serta
- menetapkan Indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102-104 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104.

Dengan penetapan asumsi makro dan target pembangunan tahun 2021 tersebut, Pemerintah agar memperhitungkan dengan cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang, dengan menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan efektif.

Kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2021 akan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Kebijakan ini dapat berjalan efektif apabila penanganan covid-19 dan dampaknya di tahun 2020 ini berjalan dengan baik.

DPR telah menyetujui kebijakan fiskal 2021 tersebut, sebagai momentum dalam melakukan penguatan dan penajaman APBN, khususnya dalam melakukan reformasi penganggaran, reformasi perpajakan dan PNBPN, reformasi Transfer Kedaerahan dan Dana Desa (TKDD), reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, dan reformasi perlindungan sosial.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan, Komisi, telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja, khususnya terkait penanggulangan Covid-19 sesuai dengan bidang Komisi.

Melalui fungsi pengawasan AKD DPR RI, terdapat berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar meningkatkan kinerja penanganan Covid-19 dan dampaknya. Catatan tersebut antara lain:

- Mempercepat efektifitas penyerapan anggaran penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral dan pemda, serta dukungan UMKM.

- Pemerintah agar memperkuat dan mempertajam program perlindungan sosial dan pemberdayaan rakyat yang diarahkan pada 40% masyarakat terbawah agar tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.
- Pemerintah agar meningkatkan sinergi kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkesinambungan.

Pimpinan DPR, melalui rapat konsultasi bersama BPK, telah mendukung upaya BPK untuk memitigasi penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Terkait keputusan Pemerintah yang membatalkan pengiriman jamaah haji tahun ini, DPR dapat memahami keputusan tersebut, meskipun seharusnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPR.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar mengelola secara optimal dana setoran jamaah haji dan nilai manfaat yang sudah ditetapkan untuk pembiayaan haji tahun 2020.

Pada Masa Sidang IV ini, DPR juga telah melakukan uji kelayakan Deputi Gubernur BI, Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan memberikan pertimbangan terhadap 32 (*tiga puluh dua*) Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Sahabat serta 6 (*enam*) Calon Duta Besar

Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

DPR juga terus berupaya berkontribusi dalam melakukan diplomasi bagi kepentingan nasional Indonesia di forum internasional melalui fungsi diplomasi parlemen.

Pada masa sidang ini, Grup Kerja Sama Bilateral DPR telah melakukan beberapa pertemuan dengan perwakilan negara mitra untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang.

Pada 29 Juni 2020 Delegasi DPR telah menghadiri pertemuan virtual the AIPA-Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) ke-3 untuk memperjuangkan agenda pemberantasan narkoba di kawasan. Ketua DPR juga menghadiri pertemuan virtual AIPA-ASEAN Interface Meeting pada KTT ASEAN ke-36 untuk membicarakan berbagai persoalan di kawasan yang harus dihadapi bersama, termasuk pandemi Covid-19.

Sidang Dewan yang terhormat, Hadirin yang saya muliakan,

Tibalah saatnya, Anggota DPR RI untuk melaksanakan reses, yang akan dilaksanakan dalam situasi dan kondisi ancaman resiko pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, kepada Yth Anggota DPR RI, agar bersama rakyat di daerah pemilihannya, bekerja bersama, bergotong royong, dalam memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan

melawan Covid-19 dalam memulihkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Pergunakanlah kesempatan Masa Reses ini, juga untuk menyampaikan kepada rakyat, tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat

Atas nama Pimpinan DPR, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 DPR memasuki Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.

Kami ucapkan selamat bekerja, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti shanti om.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD
Dr. (H.C) PUAN MAHARANI**